

“Mari *kitong* belajar menghitung karbon di tanah *pu* sendiri”

Oleh: Jusupta Tarigan, Sonya Dewi dan Kurniatun Hairiah



Yehezkiel
staf Dinas
Kehutanan
Provinsi Papua.

“Saya pikir pemahaman saya tentang karbon sudah banyak, tetapi setelah mengikuti pelatihan ternyata apa yang saya ketahui belum seberapa. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Harapan saya, kedepannya perlu ada satu metode standar dalam mengukur karbon pada tingkat lahan maupun bentang lahan sehingga lebih mudah dipahami”, kata Yehezkiel, staf Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Kalimat itu seakan mewakili puluhan peserta yang ikut dalam “Pelatihan dan Lokakarya Penaksiran Cepat Cadangan Karbon” regional Indonesia timur pada tanggal 26-30 Oktober 2009 di Kota Jayapura, Papua. Pelatihan Penaksiran Cepat Cadangan Karbon di Jayapura ini merupakan pelatihan kelima yang dilakukan di bawah payung kegiatan ALLREDDI (*Accountability and Local Level Initiative to Reduce Emission from Deforestation and Degradation in Indonesia*) yang dibiayai Uni Eropa (EU).

Pelatihan di Jayapura dapat terlaksana atas kerja sama antara kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X, sebagai panitia pelaksana, dengan lembaga pelaksana kegiatan antara lain: World Agroforestry Centre-ICRAF, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Plan), Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSLP) Bogor.

Salah satu tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah Indonesia bagian timur khususnya Papua dalam memahami teknik pengukuran cadangan karbon di tingkat plot sampai pada tingkat bentang lahan di berbagai sistem penggunaan lahan. Metode yang digunakan adalah “*Rapid Carbon Stock Appraisal*” (RaCSA) yang dikembangkan oleh ICRAF dengan melibatkan pengukuran karbon untuk tanah gambut yang metodenya dikembangkan oleh BBPSLP.

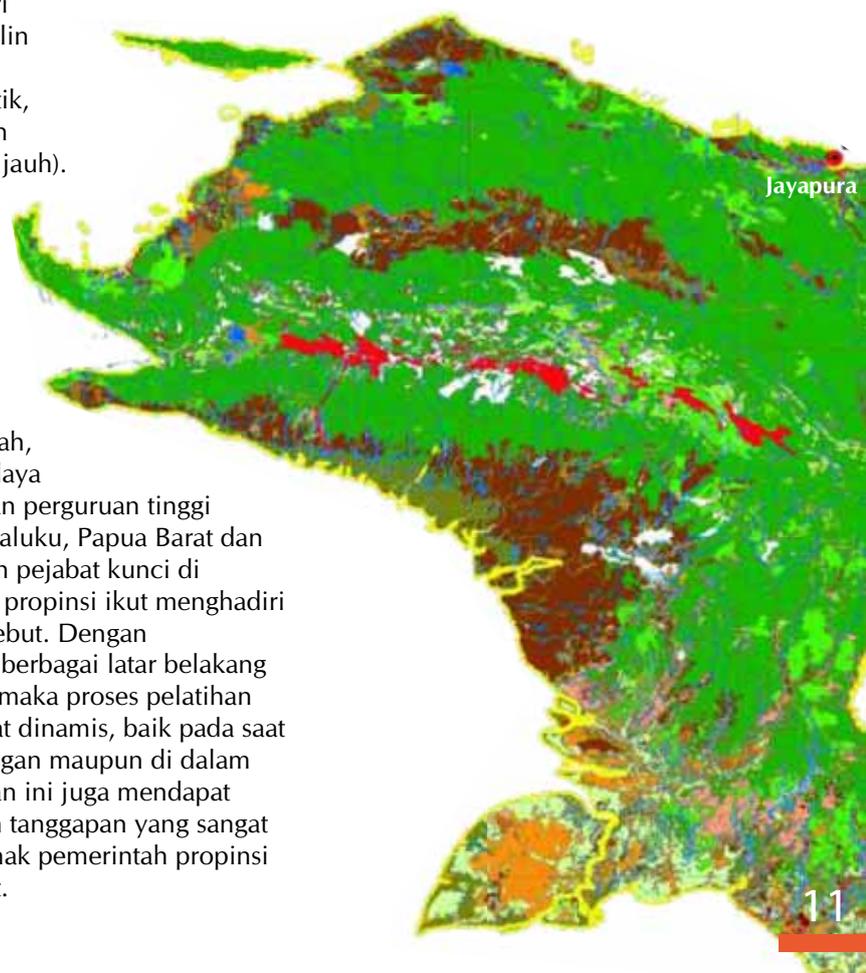
Pelatihan ini pada dasarnya memberikan pengetahuan yang lengkap dalam menghitung cadangan karbon, baik dalam hal praktek maupun pemahaman, karena metode pengukuran yang diberikan dalam pelatihan tersebut merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu (tanah, ekologi, statistik, kehutanan dan penginderaan jauh).

Peserta pelatihan berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan institusi baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dari daerah Maluku, Papua Barat dan Papua. Bahkan pejabat kunci di pemerintahan propinsi ikut menghadiri pelatihan tersebut. Dengan tergabungnya berbagai latar belakang disiplin ilmu, maka proses pelatihan menjadi sangat dinamis, baik pada saat praktek lapangan maupun di dalam kelas. Pelatihan ini juga mendapat dukungan dan tanggapan yang sangat positif dari pihak pemerintah propinsi maupun pusat.

Mengapa Papua dipilih sebagai tempat pelatihan?

Propinsi Papua adalah salah satu propinsi yang masih memiliki tutupan hutan paling besar di Indonesia, yaitu sekitar 85% dari total wilayahnya atau sekitar 31,4 juta hektar yang terbagi dalam berbagai peruntukan kawasan antara lain: hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung dan areal penggunaan lain. Dengan luas hutan yang masih relatif luas, maka Papua memiliki peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim, sehingga berpeluang dalam skema kredit REDD.

Namun di lain pihak, potensi lahan yang masih luas tersebut menjadikan Papua banyak dilirik oleh beberapa pemangku kepentingan untuk investasi, terutama di bidang petanian, perkebunan, kehutanan





dan pertambangan. Tantangan perubahan lahan yang disoroti oleh beberapa lembaga pemerhati lingkungan adalah konversi lahan hutan menjadi perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman, terutama yang terjadi pada kawasan gambut di bagian selatan Papua.

Sejalan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Propinsi Papua dan dalam upaya untuk mengurangi terjadinya perubahan lahan serta menahan laju penurunan kualitas hutan demi kesejahteraan masyarakat Papua, maka dikeluarkanlah peraturan daerah khusus (PERDASUS) Kehutanan No. 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan No. 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sebenarnya, isu pengurangan emisi karbon di Papua akibat perubahan lahan bukan isu baru. Beberapa inisiasi dalam bentuk kerja sama dan kesepakatan (MOU) antara pemerintah daerah dengan beberapa lembaga sudah dilakukan dan ditandatangani. Tentunya, kesepakatan dan kerja sama pengurangan emisi karbon di Papua tersebut juga telah diselaraskan dengan target pengurangan kemiskinan, perlindungan hak ulayat masyarakat atas sumberdaya alam, peningkatan tenaga kerja terampil dan mendorong peningkatan investasi di Papua. Beberapa contoh kebijakan yang dibuat dalam upaya pengurangan emisi karbon, diantaranya:

- Mengakui dan menghargai sistem kepemilikan lahan masyarakat terutama hak ulayat masyarakat adat
- Mengeluarkan kebijakan larangan penjualan kayu bulat dari Papua sehingga akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah
- Mengevaluasi perusahaan kayu yang tidak memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah serta mengharuskan pembangunan industri pengolahan kayu di Papua
- Mempercepat pembangunan industri skala rumah tangga dan hutan kemasyarakatan
- Memperkuat kebijakan hukum di bidang kehutanan yang berpihak kepada masyarakat lokal.

Disamping mengeluarkan kebijakan lokal yang berpihak pada usaha-usaha pengurangan emisi karbon, pemerintah Papua juga menandatangani beberapa kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait isu pengurangan emisi karbon dari



Ir. Noak Kapisa Msc,
Kepala BPKH X
Papua.

“Dampingan dan asistensi dari ICRAF beserta nara sumber lain masih sangat kami butuhkan, sehingga ilmu yang sudah didapat melalui pelatihan bisa terus digunakan”

deforestasi dan degradasi hutan melalui rencana pembangunan demonstrasi aktivitas REDD, antara lain dengan: Flora and Fauna International (FFI), New Forest (Mamberamo dan Timika), WWF Indonesia dan Conservation International.

Sayangnya, semua kerjasama yang dibuat kurang tersosialisasi dengan baik sehingga hanya para pengambil keputusan yang mengetahui adanya kerjasama tersebut. Disamping itu, bentuk kerjasama dan peran masing-masing lembaga yang terlibat juga tidak begitu jelas sehingga sampai saat ini belum terlihat kegiatan nyata dari kerjasama tersebut di tanah Papua. Satu-satunya kegiatan yang sudah dilakukan adalah penghitungan cadangan karbon di daerah Jayapura yang dimotori oleh WWF Indonesia.

Oleh karena itu, pelatihan pengukuran karbon di Papua disambut dengan sejuta harapan. Bahkan mereka masih mengharapkan dampingan, seperti diungkapkan oleh Ir. Noak Kapisa MSc, Kepala kantor Badan Pemantapan kawasan Hutan wilayah X, Papua berikut ini, *“Dampingan dan asistensi dari ICRAF beserta nara sumber lain masih sangat kami dapat melalui pelatihan bisa terus digunakan”*

Apa yang harus dilakukan Papua untuk menyongsong REDD?

Diskusi mengenai REDD tentunya tidak akan bisa terlepas dari data, metodologi, institusi dan kebijakan. Dari sisi kebijakan, pemerintah Papua sudah mengeluarkan beberapa peraturan daerah khusus yang menginduk kepada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri Kehutanan. Sementara itu, dari sisi metodologi dan kapasitas teknis untuk mengumpulkan dan

menganalisa data dan informasi, pelatihan yang diselenggarakan di Papua merupakan pelatihan pertama kali yang pernah dilakukan tentang pengukuran cadangan karbon. Diharapkan dengan pelatihan ini akan menciptakan tenaga-tenaga lokal yang mampu mengestimasi cadangan karbon dan selanjutnya dapat berperan sebagai pelatih atau nara sumber yang bisa menularkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lebih luas di Papua ini. Pelatihan selama lima hari di Kota Jayapura, dirasakan masih kurang oleh para peserta untuk menyerap semua materi yang diberikan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari suatu proses belajar, tentunya pendampingan dan bantuan dari beberapa lembaga yang mempunyai kapabilitas masih dibutuhkan.

“Di Propinsi Papua ini integrasi data di bidang sumberdaya alam masih sangat lemah”. Ungkapan tersebut disampaikan oleh hampir semua peserta pada sesi evaluasi. Untuk itu, perlu kiranya ada suatu koordinasi dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan data tersebut, dan menginisiasi upaya untuk mengisi kesenjangan, sehingga nilai 'baseline' emisi di Papua bisa ditetapkan. Hal ini perlu untuk menegosiasikan skema yang nantinya akan disetujui bersama. Selain itu, perlu adanya dukungan untuk upaya pengumpulan data yang komprehensif sehingga membantu dalam menyongsong program REDD di masa depan. Data tutupan hutan, data cadangan karbon pada berbagai sistem penggunaan lahan, data kepemilikan lahan, sejarah kepemilikan lahan dan data sosial ekonomi masyarakat adalah beberapa data yang akan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah Papua dalam menjalankan mekanisme REDD.



Ir. Martein Kayoi MM,
Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Papua.

“Saya berharap kontribusi peserta dari Papua dalam menghitung cadangan karbon di Papua akan terlihat nyata dari pelatihan ini”

Rencana pembentukan kelompok kerja pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi (*Task force REDD*) Papua dalam waktu dekat ini merupakan salah satu strategi yang tepat dalam menyongsong mekanisme REDD.

“Susunan tim yang akan tergabung dalam POKJA ini merupakan kumpulan putra daerah terbaik tanah Papua yang ahli di bidang masing-masing serta dibantu oleh para tenaga kaum muda Papua yang sudah mengikuti pelatihan pengukuran cepat cadangan karbon di Jayapura”, demikian disampaikan Bapak Noak Kapisa dalam diskusi santai dengan penulis beberapa waktu yang lalu di Jayapura.

Sebagai propinsi yang mempunyai peluang besar dalam menjalankan skema REDD di masa yang akan datang, sudah selayaknya jika propinsi ini menitik-beratkan strateginya di beberapa bidang yaitu:

1. Merancang kegiatan prioritas dengan emisi karbon rendah serta biaya paling ekonomis
2. Memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat serta membuka kemungkinan kerja sama bilateral dan internasional sehingga memberikan lebih banyak pilihan kepada Papua
3. Memperjelas dan memfinalisasi rencana tataguna lahan propinsi dan mensosialisasikannya dengan kabupaten, distrik dan kampung
4. Melakukan pengukuran-pengukuran cadangan karbon di beberapa tempat di Propinsi Papua baik di tanah mineral maupun di tanah gambut
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Pelatihan singkat penghitungan cepat cadangan karbon di tanah Papua diakhiri dengan lahirnya sebuah tantangan nyata bagi para peserta khususnya peserta dari tanah Papua. Tantangan tersebut berupa kemandirian di dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam menyongsong mekanisme REDD di tanah Papua. “Papua itu sangat kaya akan potensi sumberdaya alam khususnya kehutanan dan mempunyai potensi serta berperan penting dalam mensukseskan mekanisme REDD di Indonesia. Saya berharap banyak terhadap peserta dari Papua akan kontribusi mereka dalam menghitung cadangan karbon di tanah Papua”, demikian Bapak Ir. Marthen Kayoi MM, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua menjelaskan harapannya kepada penulis, semoga.

